



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
KOMISI X DPR RI  
PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021  
KE KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR  
TANGGAL 10 S.D. 14 APRIL 2021**

**I. PENDAHULUAN**

Komisi X DPR RI membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021 bahwa Komisi X DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke 3 (tiga) daerah yaitu ke Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

**A. Dasar Hukum**

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Pasal 60 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Jawa Timur.
6. Surat Tugas Nomor 28/PS.10/IV/2021 Tanggal 8 April 2021.

**B. Maksud dan Tujuan**

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Pejabat Daerah mengenai implementasi UU dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di provinsi/kabupaten/kota yang dikunjungi.

Tujuan kunjungan kerja ini adalah:

1. Untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 di Kota Malang Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam masa pandemi Covid-19, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.
3. Memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja Non RUU Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk pengambilan kebijakan, khususnya dalam masa pandemi Covid 19.

### **C. Tim Kunjungan Kerja**

Tim Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 oleh Komisi X DPR RI ke Kota Malang Jawa Timur terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat Komisi X, Tenaga Ahli Komisi X, dan Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Bertindak selaku ketua tim adalah Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol (A-444/Fraksi Partai Demokrat).

Tim kunjungan didampingi oleh Mitra Kerja Komisi X DPR RI dari Kemendikbud RI, yaitu Kepala Biro Perencanaan Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., dari Kemenparekraf RI Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Muhammad Neil El Himam, M.Sc. dan Sekretaris Deputy Bidang Pemasaran Dra. Sumarni, dari Kemenpora RI Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Drs. Chandra Bhakti, M.Si. dan Asisten Deputy Kemitraan dan Penghargaan Pemuda pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Drs. Wisler Manalu. M.M. serta dari Pepusnas RI.

### **D. Agenda Kunjungan Kerja**

Melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Provinsi Jawa Timur yang dihadiri:

- a. Forkompinda Kota Malang
- b. Ketua DPRD Kota Malang
- c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
- d. Ketua LPMP Provinsi Jawa Timur
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang
- f. Kepala Dinas Pariwisata Kota Malang
- g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang
- h. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Malang
- i. Perwakilan Dewan Pendidikan, PGRI dan organisasi Pendidikan Kota Malang
- j. Perwakilan PHRI, HIPMI dan Komunitas Parekraf Kota Malang
- k. Perwakilan Organisasi Kepemudaan Kota Malang
- l. Perwakilan Kwarda Gerakan Pramuka Kota Malang
- m. Pimpinan L2DIKTI Wilayah VII Wilayah Jawa Timur
- n. Pimpinan PTN dan PTS di Kota Malang, yaitu:
  - 1) Perwakilan Universitas Brawijaya

- 2) Perwakilan Universitas Negeri Malang
- 3) Perwakilan Politeknik Negeri Malang
- 4) Perwakilan Universitas Muhammadiyah Malang
- 5) Perwakilan Universitas Islam Malang
- 6) Rektor Institute Teknologi Nasional (ITN)

Peninjauan lapangan ke SMP Negeri 4 Kota Malang terkait persiapan Pembelajaran Tatap Muka, dan kunjungan ke Universitas Brawijaya terkait penerapan protokol kesehatan pada tes UTBK.

## II. TEMUAN DATA

### A. Bidang Pendidikan Dasar Menengah

1. Program PIP sudah tepat sasaran, hanya kendala pada data dan pencairan yang sering tidak sinkron karena siswa penerima ada yang telah lulus ketika dana cair. Program BOS sudah sesuai dengan peruntukannya bahkan tahun 2021 dengan panduan yang lebih aspiratif kebutuhan operasional sekolah. Program DAK dengan usia bangunan sekolah yang bervariasi dan ada yang harus segera membutuhkan perawatan, dilakukan pemilihan kegiatan skala prioritas.
2. Terkait Kurikulum, Satuan pendidikan menyelenggarakan kurikulum sesuai dengan panduan dari pemerintah pusat dan implementasinya sesuai kondisi satuan pendidikan. Mulai dari penyesuaian Kurikulum Darurat dan pemerintah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Yang paling akhir ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor O3IKBI2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.O1.08/MENKDSI4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 202 1 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronauirus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 8 April 2021.
3. Terkait Pembelajaran Jarak Jauh, Pemerintah sudah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam implementasinya sesuai kondisi masing-masing. Sekolah mengembangkan pola sesuai kondisi satuan pendidikan dan peserta didik. Implementasi dengan kombinasi daring sinkron dan asinkron. Ada yang daring sinkron full setiap hari dan ada yang tidak setiap hari. Ada yang kombinasi daring dan luring, bahkan ada yang pola *Hybrid* (daring sinkron yang diikuti juga oleh siswa yang mengikuti di kelas/luring).
4. Terkait Vaksinasi, hingga saat ini masih ada beberapa GTK di suatu sekolah yang belum vaksinasi dan bahkan ada sekolah yang semua GTK nya masih belum vaksinasi, menyesuaikan dengan ketersediaan vaksin.
5. Masukan terkait RUU Praktik Psikologi: Praktik Psikologi, ada yang secara mandiri, di fasilitas pelayanan kesehatan; dan di lembaga pemerintahan dan swasta atau di tempat lain sesuai dengan sasaran kliennya. Namun belum tertulis untuk lembaga pendidikan. Mengapa perlu? Karena dengan makin gencarnya kita menuju pendidikan yang ramah dan bersahabat, profesi psikolog diperlukan di lembaga pendidikan. Memang di sekolah terutama sekolah negeri (meskipun di PAUD dan SD tidak ada) sudah ada tenaga guru BK namun dari sisi kompetensi, standar profesi dan standar pelayanan masih membutuhkan

psikolog di sekolah. Hanya saja, aturan standar pendidik dan tenaga kependidikan juga perlu disesuaikan.

6. Terkait program Kemendikbud RI mengenai merdeka belajar, Merdeka Belajar memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan. Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak menjadi tahapan yang solutif di masa pandemi. Salut pada program yang masih akan dilaksanakan yaitu Kampus Mengajar yang pastinya akan memberikan solusi praktis untuk mendekatkan kampus dengan pendidikan di level bawahnya.
7. Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang terus mengalami peningkatan dan tertinggi kedua ke Jawa Timur. IPM pada tahun 2020 adalah 81,45, dengan skor komponen per IPM : angka harapan hidup 73,27, rata-rata lama sekolah 10,18, harapan lama sekolah 15,51 dan pengeluaran per kapita 16,59 juta. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, IPM Kota Malang 81,45 dan Jawa Timur 71,71 dan IPM nasional 71,94.
8. Satuan pendidikan telah mempersiapkan secara baik Pembelajaran Tatap Muka, dengan dukungan berbagai pemangku pendidikan serta gugus tugas Covid-19.
9. Dinas Pendidikan Kota Malang menyetujui adanya revisi terhadap UU Sisdiknas dengan alasan Undang-Undang ini perlu di *update* terutama perihal pengaturan terhadap komite sekolah. Revisi terhadap UU Sisdiknas ini memerlukan kajian secara mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
10. Terhadap permasalahan guru honorer telah ada penyelesaian antara lain yaitu adanya PPPK Guru meskipun belum memenuhi harapan para guru. Permasalahan lain dalam bidang pendidikan yaitu keterbatasan guru pada jenjang SD dan SMP, serta adanya pemisahan kewenangan pendidikan dasar yang berada di Kabupaten, pendidikan menengah di Provinsi dan pendidikan tinggi di pusat. Hal ini berpengaruh terhadap pengembangan mutu pendidikan.
11. Dalam pengelolaan dana BOS diperlukan tenaga Tata Usaha sehingga diperlukan rekrutmen tenaga Tata Usaha.
12. Dalam memahami konsep merdeka belajar, terjadi pemahaman yang sangat beragam, sehingga untuk saat ini diperlukan standarisasi hasil belajar.

## **B. Bidang Pendidikan Tinggi**

1. Kota Malang memiliki 54 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dengan 4800 lulusan setiap tahunnya, yang berasal dari 21 Perguruan Tinggi yaitu tiga Perguruan Tinggi Negeri dan 18 Perguruan Tinggi Swasta.
2. Terdapat 21 Perguruan Tinggi yang memiliki jurusan yang berkaitan dengan subsektor aplikasi dan game. Hal ini didukung oleh 624 pelaku personal linear dan aktif dari *freelance* hingga karyawan perusahaan. Sebanyak 2200 serapan tenaga kerja yang memberikan peluang terhadap bidang yang lain seperti bidang akuntansi dan marketing.
3. Universitas Brawijaya saat ini sedang melaksanakan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai ujian masuk bagi mahasiswa baru, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

4. Kebijakan mengenai Kampus Merdeka dirasakan terlalu mendadak, sehingga pihak Perguruan Tinggi merasa belum siap untuk melaksanakan program kampus merdeka.
5. Hampir seluruh Perguruan Tinggi Vokasi belum mampu melaksanakan rekognisi jika kurikulum tidak segera ditambah(dievaluasi).
6. Perguruan tinggi menghadapi beberapa permasalahan antara lain menyangkut akreditasi, jurnal terindeks scopus, Guru Besar dan ketersediaan sumber daya manusia.
7. Perguruan Tinggi mengembangkan kelas unggulan sebagai sarana untuk mencapai indikator pekerja utama.
8. Hibah bagi perguruan tinggi diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
9. Untuk mewujudkan insan Pendidikan Tinggi, maka diperlukan hilirisasi hasil penelitian. Artinya dosen yang memiliki penelitian, hendaknya bisa disinergikan dengan dunia industri.
10. Terkait pembelajaran jarak jauh, terdapat kendala pada provider internet, meskipun telah ada bantuan kuota pendidikan dari Kemendikbud RI.

### **C. Bidang Olahraga**

1. KONI Kota Malang telah melakukan MoU dengan sekolah untuk melaksanakan pembibitan atlet-atlet terbaik yang siap berlaga dalam berbagai event.
2. Ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan disatuan pendidikan diseluruh Kota Malang sebagai sarana untuk melatih kemandirian dan keterampilan peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman. Bahkan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang merupakan Kwartir Cabang tergiat ke dua se-Jatim.
3. Dinas Pendidikan Kota Malang menyayangkan adanya 10 cabor yang ditunda dalam PON Papua dan Peparnas, dan menghimbau agar hal ini tidak menjadi hambatan bagi even yang ada di daerah.

### **D. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

1. Kebijakan umum terkait ekonomi kreatif di Kota Malang adalah:
  - a. Menetapkan ekonomi kreatif sebagai lokomotif perekonomian daerah yang ditunjukkan melalui penetapan pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai sasaran strategis pada Misi 2 RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023.
  - b. Menetapkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis dimaksud, dan melekatkan tanggung jawab pengembangan ekraf melalui Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
  - c. Menetapkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan Dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018 – 2022, dan menyusun 6 (enam) draft rancangan Peraturan Walikota terkait roadmap pengembangan sub sektor- sub sektor ekonomi kreatif.
  - d. Lelang Kinerja untuk Perangkat Daerah Pengampu Pengembangan Ekonomi Kreatif.
  - e. Proses Pembangunan Malang Creative Center (MCC) sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- f. Pengembangan ekosistem Pentahelix dengan membentuk Komite Ekonomi Kreatif.
  - g. Mendorong pelaksanaan program/kegiatan pengembangan ekonomi kreatif melalui anggaran APBD maupun APBN.
2. Permasalahan yang dihadapi terkait pengembangan ekonomi kreatif dalam 3 tahun terakhir:
- a. Lemahnya Pemasaran produk-produk kreatif. Langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah membangun branding Kota Malang sebagai kota kreatif, membangun branding produk-produk kreatif, membangun kanal digital direktori pelaku ekonomi kreatif, menyelenggarakan event-event promosi.
  - b. Kurangnya kepercayaan konsumen atas kualitas produk kreatif. Permasalahan ini diatasi dengan pelatihan dan pendampingan penerapan standar mutu serta fasilitasi sertifikasi standar mutu bagi produk-produk kreatif.
  - c. Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini diatasi dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.
  - d. Kurangnya pendampingan dari para pelaku profesional. Permasalahan ini nantinya akan diatasi melalui pembentukan klinik bisnis di Malang *Creative Center* dan meningkatkan kolaborasi dengan klinik/inkubator bisnis dan asosiasi profesional yang ada di Kota Malang maupun dari wilayah lain di Indonesia.
  - e. Perlunya pemusatan pengembangan ekonomi kreatif, yang diatasi melalui penyediaan *co working space* di lima kecamatan dan pembangunan Malang Creative Center (MCC)
  - f. Kurangnya dukungan untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, yang diatasi dengan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif yang merupakan perwujudan kolaborasi pentahelix dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Malang.
3. Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sebagai Sasaran Strategis Pemerintah Kota Malang pada RPJMD 2018 – 2023, dengan Perangkat Daerah pengampu yaitu: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Disnaker PMPTSP dan Disporapar. Sejalan dengan Visi Misi Walikota tersebut maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, menyusun Rencana Strategis Diskopindag Tahun 2018 – 2023 dan melaksanakan program/kegiatan pengembangan industri kreatif yang melekat pada Program Pengembangan Industri yang mengacu pada Peraturan Walikota Malang Nomor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan Dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018 – 2022, dengan kegiatan:
- a. Pencitraan Produk Industri Kreatif: Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun branding Kota Malang sebagai Kota Kreatif dan branding produk industri kreatif prioritas Kota Malang. Tujuan yang ingin dicapai adalah menguatnya positioning Kota Malang sebagai Kota kreatif, meningkatnya daya saing serta pertumbuhan industri kreatif sebagai lokomotif perekonomian Kota Malang.
  - b. Penyelenggaraan event Industri Kreatif: Menyelenggarakan event kreatif tahunan Kota Malang sebagai wadah bagi IKM/Komunitas

Kreatif untuk menampilkan produk unggulan, performa IKM, seminar, lomba, dll

- c. Workshop Teknis Industri Kreatif: Memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi teknis IKM kreatif Kota Malang, agar kualitas produk IKM kreatif meningkat sehingga daya saingnya meningkat pula.
- d. Operasional dan aktifasi Malang *Creative Center*: Merupakan pelaksanaan amanat penyediaan infrastruktur sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif.
- e. Penguatan Kelembagaan: Peningkatan legalitas lembaga di sektor industri kecil menengah, termasuk juga lembaga/kelompok/komunitas kreatif. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya lembaga-lembaga IKM dan ekonomi kreatif yang berbadan hukum dan berdaya.
- f. Pengembangan produk: Melakukan penelitian pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing produk unggulan Kota Malang. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanah undang-undang ekonomi kreatif tentang pengembangan riset.
- g. Pengembangan Kemitraan bagi Industri: Mengembangkan kemitraan antara pelaku industri di kota Malang dengan berbagai pihak seperti Perguruan Tinggi, BUMN, Dunia Usaha, dll.
- h. Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM industri: Memberikan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi Kompetensi bagi pelaku industri kreatif untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku industri kreatif dan daya saing tenaga kerja di sektor industri kreatif terhadap tenaga kerja asing.
- i. Peningkatan desain dan teknologi: Meningkatkan kualitas desain dan peningkatan teknologi industri kreatif
- j. Forum stakeholder industri : Merupakan kegiatan rembug pentahelix untuk menghasilkan rumusan dan bahan rancangan kebijakan pengembangan ekraf
- k. Pembinaan penerapan standar mutu: Pembinaan terkait penerapan standar mutu untuk meningkatkan kualitas produk IKM, seperti SNI, Halal, MD, dll.
- l. Fasilitasi standarisasi industri dan KI: Memberikan fasilitas standarisasi produk (SNI, Halal, Merk, dll) dan kekayaan intelektual, seperti merk, batik mark, dll.
- m. Pengembangan Sistem Informasi Data Industri: Pemutakhiran data yang dilaksanakan setiap tahun, termasuk data pelaku industri kreatif.  
Program/kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat mendukung pencapaian target daerah yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif dan target nasional sebagaimana tersebut diatas.

4. Dukungan pemerintah terhadap pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2020 yang terdampak pandemi Covid-19: Penyebaran virus corona yang begitu masif memberikan dampak signifikan terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif, nasional maupun daerah. Seluruh sektor ekonomi, termasuk Dunia Pariwisata

mengalami penurunan luar biasa sebagai dampak penurunan kedatangan wisatawan internasional maupun aktivitas wisatawan Nasional akibat pandemi ini. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB maupun PDRB mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pemulihan sektor ekonomi pasca pandemi tidak berhasil dilakukan, maka tingkat pengangguran akan meningkat.

Pandemi ini juga menimbulkan peluang lain bagi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perubahan model bisnis dari traditional management menjadi digital management akan menjadi peluang dalam mempertahankan dan memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Sektor ekonomi kreatif berbasis digital juga dapat menjadi solusi lain dalam meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDB/PDRB. Orientasi segmen pasar akan bergeser dari Wisman menjadi Wisatawan Nusantara (Wisnus), hingga penerbangan internasional kembali pulih seiring penanganan pandemi Covid19 yang semakin baik. Untuk itu, diperlukan strategi khusus terintegrasi dalam menghadapi dampak pandemi Covid19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Terutama dalam masa tanggap darurat pada tahun 2020 dan recovery pada tahun 2021-2022 sesuai kondisi global.

Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kota Malang, khususnya yang telah dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang antara lain adalah :

- a. Penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan usaha industri kreatif pada era new normal
  - b. Penyaluran bantuan sosial bagi UMKM, termasuk juga pelaku industri kreatif yang terdampak pandemi Covid-19.
  - c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi berupa pelatihan untuk pengembangan produk-produk yang dibutuhkan pada masa pandemic seperti APD, makanan *frozen food/ready to eat and ready to serve*; stimulus bahan baku dan peralatan; fasilitasi halal, SNI, Nutrition fact, MD, merk; penyelenggaraan event-event promosi baik virtual maupun luring; pemanfaatan digital marketing (e-commerce lokal) untuk pemasaran produk-produk UMKM; Pendampingan secara langsung kepada pelaku industri kecil dan menengah.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
- a. pengembangan riset;
  - b. pengembangan pendidikan;
  - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
  - d. penyediaan infrastruktur;
  - e. pengembangan sistem pemasaran;
  - f. pemberian insentif;
  - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
  - h. perlindungan hasil kreativitas.



Menindaklanjuti amanah undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan Dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018-2022 (Sub Sektor Game, aplikasi, Kuliner, dan Film, Video, Animasi).

Selain itu telah disusun 6 (enam) rancangan Peraturan Walikota tentang roadmap pengembangan ekonomi kreatif sub sektor fashion, kriya, DKV, arsitektur dan pertunjukan. Pada Peraturan Walikota tersebut, pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dikelompokkan pada 3 (tiga) Program Utama, yaitu : Penyediaan Infrastruktur; Pengembangan Ekosistem ;dan Peningkatan Pemasaran. Pada Lampiran Peraturan Walikota telah diatur Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi dalam bentuk program/kegiatan.

#### E. Data Kunjungan Lapangan

| No | Lokasi Kunjungan      | Keterangan  |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Universitas Brawijaya | <p>a. Universitas Brawijaya sedang melaksanakan Ujian tertulis Berbasis Kompetensi. UTBK dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat.</p> <p>b. UTBK tidak mengharuskan peserta untuk swab antigen, namun cukup tes suhu dan menjaga jarak sesuai protokol Kesehatan.</p>  |
| 2. | SMPN 4 Kota Malang    | <p>a. Alamat: SMP Negeri 4 Malang Jl. Veteran No.37 Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.</p> <p>b. Menerima Dana BOSDA 2019 dengan total anggaran Rp1.140.300.000 dengan total realisasi Rp 836.253.600</p> <p>c. Memiliki prestasi antara lain kejuaraan lomba kaligrafi, kejuaraan tennis Kota Malang, Lomba Vokal, Taekwondo, melukis, tari dan musik tradisional.</p> |

#### F. Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Kota Malang dapat memulai kebijakan pembelajaran tatap muka, dengan melakukan vaksin terlebih dahulu kepada para guru. Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
2. Mengapresiasi UTBK di Universitas Brawijaya. UTBK tidak mengharuskan peserta untuk swab antigen, namun cukup tes suhu dan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. Universitas Brawijaya merupakan kampus percontohan yang baik pada sistem penerimaan mahasiswa baru ditengah pandemi virus Covid-19.

#### G. Walikota Malang Drs. H. Sutiaji menyampikan pandangan sebagai berikut:

1. Porsi wisatawan Jatim yang menuju malang raya adalah sebesar 24% dan jumlah UMKM di Kota Malang adalah lebih dari 5000 UMKM.

2. Kota Malang memiliki semboyan bahwa ekonomi kreatif berbasis kekuatan sumber daya manusia Kota Malang akan menjadi lokomotif penggerak masa depan. Pada tahun 2017, terdapat 92 perusahaan *start up* dan pada tahun 2019 terdapat 151 perusahaan *start up* yang berhubungan dengan game dan aplikasi baik produk maupun servis/jasa. Pada tahun 2017 terdapat 10 komunikast kreatif dan pada tahun 2019 terdapat 18 komunitas kreatif yang berkaitan dengan aplikasi dan game. Pada tahun 2017 terdapat 4 *co working space* dan pada tahun 2017 terdapat 18 *co working space* yang digunakan oleh *freelancer* dan *start up*. Meskipun tim masih tergolong sedikit, namun program *co working space* telah berhasil dilakukan di lima kecamatan di Kota Malang.
3. Roadmap Ekonomi Kreatif Kota Malang berdasarkan Perwal Nomor 12 tahun 2018, ditetapkan adanya tiga subsektor sebagai prioritas dan unggulan dari kota Malang. Game dan aplikasi merupakan subsektor prioritas, sedangkan film, video, animasi dan kuliner sebagai subsektor unggulan.
4. Kota Malang menetapkan tahapan target sebagai berikut: pada fase pertama, yaitu tahun 2018 s.d 2019, ditetapkan target Malang bersinergi dengan satu data industri game dan aplikaso. Pada fase kedua yaitu pada tahun 2020 s.d 2021, ditetapkan target Malang berdaya, dengan penguatan SDM berbasis industri (sertifikasi dan produk (IP dan Jasa) yang berkualitas. Pada fase ketiga, yaitu tahun 2022 s.d 2023, targetnya adalah malang mendunia, dengan adanya ketertarikan korporasi global untuk berinvestasi di Malang.
5. Tiga fokus program telah ditetapkan dan terus berjalan medkipun ditengah pandemi. Salah satunya adalah pembangunan Malang creative Center, sebagai pusat inkubassi ekonomi kreatif yang ditargetkan selesai pada tahun 2022. Hal ini akan terwujud dengan dukungan penyediaan infrastruktur, pengembangan ekosistem dan peningkatan pemasaran.UMKM dipersiapkan sebagai kekuatan ekonomi Kota Malang yang siap naik kelas, dengan dukungan dari ibu-ibu Forkopimda yang turut mempromosikan karya kreatif batik Malangan dalam ajang Malang Batik Festival. Hal ini berfokus pada strategi pemulihan yaitu pendanaan, pendampingan dan pemasaran.
6. Dalam hal pendanaan, maka terdapat program OJIR (Ojo Percoyo Karo Renternir) sebagai upaya untuk memberantas renternir. Kemudian kredit pembiayaan tanpa jaminan dan tanpa bunga untuk usaha produktif masyarakat. Tidak hanya pembiayaan, namun juga dipadukan dengan literasi keuangan digital sehingga meraih TPAKD award pada tahun 2020. Pemasaran dilakukan dengan penguatan pemasaran digital dan kebijakan keberpihakan UMKM lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pendampingan dilakukan pada berbagai apek peningkatan kapasitas UMKM agar segera naik kelas.
7. Komitmen revitalisasi pasar rakyat dari aspek fisik maupun mindset antara lain melalui penguatan daya saing ekonomi kerakyatan terhadap rite modern dan diselarasskan dengan penyiapan pasar tangguh. Sepuluh pasar yang telah go digital diploting dengan melibatkan

dukungan perbankan dan akademisi sebagai salah satu wujud pentahelix pembangunan.

8. Terdapat top 45 sinovik Kemenpan RB 2020. Sekolah Pasar pedagang Cerdas adalah sebuah inisiatif untuk merevitalisasi mindset dan pengetahuan pedagang, mengkombinasikan nilai-nilai tradisonal dengan demand modern, yang dilakukan dalam skema pemberdayaan secara partisipatif. Program ini dimulai pada tahun 2017, dengan lokasi rintisan pssar oro-oro dowo, dengan jumlah peserta sebanyak 128 pedagang pasar (75% perempuan). Total potensi berdasarkan kelompok sasaran adalah 10.741 pedagang pasar kota Malang), dengan jumlah kegiatan terlaksana sebanyak 140 kali (sampai dengan Juni 2020).
9. Kota Malang memiliki target untuk memulihkan pariwisata kota dengan adaptasi, standarisasi dan sinergi potensi dengan 39 pelaku usaha industri jasa pariwisata yang telah memenuhi standar CHSE, destinasi unggulan diperkuat, dan kayutangan heritage dihadapkan menjadi motor baru pariwisata.
10. Jenis pariwisata potensial antara lain wisata kota, wisata kuliner, wisata halal, wisata heritage dan religi. Malang memiliki sejumlah destinasi unik di wilayah kota, mulai dari taman kota, pusat perbelanjaan, hingga yang terbaru yaitu ragam kampung tematik. Untuk wisata kuliner, Malang masuk dalam tiga besar subsektor ekonomi kreatif prioritas pada saat assesment dengan BEKRAF. Malang sejak dahulu terkenal dengan ragam kulinernya termasuk makanan olahan modern. Potensi turis yang mencari wisata halal semakin meningkat seiring menguatnya perekonomian di Asia dan Afrika. Hal ini merupakan peluang sehingga perlu dioptimalkan kesiapan berbagai aspek. Kota malang punya warisan sejarah yang lengkap mulai dari era kerajaan Hindu, Ilam, Kolonial hingga era kemerdekaan. Melalui Perda Cagar Budaya dan perda terkait RDTR dan P landasan hukum pendukung telah disiapkan. Inisiatif Kampung Tematik juga sempat menjaring sejumlah potensi terkait wisata heritage dan religi. Pembangunan infrastruktur terintegrasi terus dan diperkuat dengan peningkatan mobilitas antarwiyah, efisiensi biaya ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan skema padat karya yang selaras dengan Kota Malang yang nyaman sebagai the future of malang.
11. Kemudahan berusaha dan digitalisasi layanan publik didorong menuju level baru dengan 98% layanan periiinan telag didelegasikan, memperpendek proses perizinan melalui aplikasi si-lzol. Raperda kemudahan berusaha siap menjadi payung hukum dengan memberikan insentif bagi investor yang selaras dengan visi kota. Mal pelayanan publik ditargetkan oeprasionalnya bulan Agustus 2021.
12. Dukungan pemerintah daerah terhadap target-target yg ditetapkan pemerintah dalam kepariwisataan dan ekraf dalam tahun 2021 antara lain:
  - a. Pemerintah Kota Malang berusaha kembali meningkatkan kunjungan wisatawan yang sempat turun sampai 90% dan kemudian berangsur naik hingga 66,8% di akhir tahun 2020 karena

- situasi pandemi dengan cara menggencarkan kembali pagelaran event pada destinasi unggulan di kampung-kampung tematik di kota Malang. Event-event yang dilaksanakan sebanyak 40 event dan mulai digelar oleh pokdarwis sejak bulan April - Desember 2021 dengan mengangkat kearifan lokal di masing-masing kampung tematik. Event yang digelar meliputi pertunjukan seni, budaya, musik, kriya hingga kuliner;
- b. Membangun destinasi kreatif baru di ex TPA Lowokdoro. Di areal seluas 11 ha ini akan dijadikan lokasi gantangan burung dan tempat pusat oleh-oleh dan jajanan tradisional khas kota malang;
  - c. Memberikan sertifikasi chse kepada 34 hotel, resto, cafe dan tempat olahraga. Membentuk kampung tangguh di kampung tematik yang menjadi tujuan destinasi wisata untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta menumbuhkan kepercayaan wisatawan untuk datang berkunjung;
13. Dukungan pemerintah terhadap pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2020 yang terdampak pandemi covid 19 antara lain:
    - a. Bantuan insentif dan bansos dari Kemenpar RI kepada hotel dan restoran di kota Malang di tahun 2020 sebagai salah satu bentuk apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri dan semangat para pelaku usaha pariwisata untuk menata kembali usahanya.
    - b. Pemerintah Kota Malang juga mengucurkan bantuan sosial yang diterima oleh pedagang WBT (Wisata Belanja Tugu) selama 3 (tiga) bulan diawal pandemi untuk membantu menggairahkan semangat berusaha dan optimisme.
  14. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan pariwisata dan ekraf sesuai dgn amanah UU dan jati diri bangsa?
    - a. Pengembangan kepariwisataan bukan hanya berupa upaya peningkatan perekonomian, pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja, namun juga menekankan pada keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam rangka keberlanjutan kepariwisataan dan pelestarian sumber daya alam dan budaya asli kota Malang.
    - b. Sehingga pariwisata kota malang harus tetap mengadopsi lokal wisdom agar tetap memiliki ciri khas daerah sebagai sesuatu yang otentik dan berbeda dengan daerah lain.
  15. Komisi X DPR RI bersama pemerintah akan melakukan revisi UU no 10/2009 tentang kepariwisataan. Saran dan masukan terhadap substansi UU yg perlu direvisi antara lain sebagai berikut:
    - a. Pembangunan di bidang pariwisata harus diselaraskan dengan pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni dan pemberdayaan masyarakat setempat disekitar objek wisata yang dikembangkan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 19 ayat 2 bahwa masyarakat disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk menjadi pekerja. Maka perlu ditambahkan poin yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan kontraksi terhadap pengelola tempat wisata atau destinasi

tujuan wisata untuk melibatkan masyarakat sekitar sejak memulai proses perencanaan suatu kawasan/destinasi wisata dan mendahulukan rekrutmen tenaga kerja dari warga setempat yang memiliki potensi yang sesuai dengan kebutuhan;

- b. Terkait tentang kampung/desa wisata agar diatur secara detail dalam UU No. 10/2009 mengingat kampung/desa wisata saat ini mulai menjadi alternatif destinasi wisata yang terus dikembangkan oleh daerah. Aturan secara detail tentang kampung/desa wisata ini akan menjadi pedoman yang terarah, terukur dan terencana bagi daerah untuk menjalankan pengelolaan kampung/desa wisata sehingga bisa dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat sekitar;
- c. Aturan tentang kelembagaan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) agar dicantumkan lebih detail untuk mempermudah pembentukan dan pelaksanaan tugas asosiasi tersebut di daerah.

#### **H. Pejabat dari Kemendikbud RI menyampaikan mengenai berbagai hal antara lain sebagai berikut:**

1. Terkait kampus merdeka, Kemendikbud menterjemahkan delapan indikator kinerja utama, antara lain terkait kualitas lulusan dosen, dan kualitas pembelajaran.
2. Percepatan untuk menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum dapat dilakukan melalui akreditasi. Data di Padangkalan Data Pendidikan Tinggi terkait rasio dosen selalu menjadi pertanyaan. Penilaian angka kredit untuk Profesor dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas baik secara administratif maupun proses.
3. DAK Fisik dan non fisik Pendidikan Kota Malang Tahun Anggaran 2021. Arah kebijakan DAK Fisik Pendidikan Tahun 2021 adalah pertama, meningkatkan ketersediaan /keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan tenaga kerja pendidikan rendah. Kedua, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. Ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas. Major project, dan sektor prioritas nasional (khususnya sektor pariwisata dan industri).
4. Terkait DAK reguler, dipergunakan untuk revitalisasi PAUD, SD, SMP,SKB,SMA,SLB dan SMK. Berdasarkan arahan Mendikbud, rehabilitasi dan pembangunan prasarana pendidikan melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan (menggunakan instrument PUPR) hingga pelaksanaan. Penyediaan sarana pendidikan diwajibkan menggunakan e katalog, kecuali jika terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat menggunakan metode lain yang relevan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan.Total DAK Fisik Pendidikan Tahun 2021 Kota Malang adalah sebesar Rp14.569.808.000

5. Dana BOS diarahkan untuk mendanai belanja non personalis bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkingkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BOS SD/SDLB dan SMP/SMPLB untuk menjadi terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan BOS SMA/SMALB dan SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Digunakan juga untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalis bagi satuan pendidikan dasar dan menengah antara lain: pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembelian alat multi media pembelajaran, penerimaan peserta didik baru, administrasi sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, pembayaran honor guru non PNS, penyelenggaraan bursa kerja khusus, raktek kerja industri, praktik kerja lapangan dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru dan lembaga sertifikasi, penyelenggaraan uji kompetensi eaklian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi bahasa asing berstandar internasional.
6. Alokasi BOS Tahun 2021 Kota Malang sebesar Rp 191.891.600.000 untuk BOS reguler, dengan sasaran 495 sekolah dan 162.851 siswa.
7. Alokasi BOP Kota Malang sebesar Rp3.843.400.000 untuk BOP kesetaraan dengan sasaran 2.358 siswa dan Rp17.248.200.000 untuk BOP PAUD dengan sasaran 28.747 siswa.

**I. Pejabat Kemenpora RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:**

1. Alokasi anggaran untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur sebesar Rp4.219.552.000, dengan rincian sebagai berikut: pelatihan pelatih sepakbola lisensi D sebesar Rp150.000, persiapan dan pembuatan konten Rp901.212.000 dan pemberian dana dekonsentrasi PPLP Rp3.937.200.000. Pemberian dana dekonsentrasi PPLP terbagi dalam 4 jenis program yaitu tes seleksi masuk diklat PPLP, pembinaan PPLP, tes pengukuran PPLP/PPLM daerah dan operasional satker.
2. Terkait PON Papua awalnya ditetapkan 47 cabor menjadi 37 cabor. 37 cabor diselenggarakan di Papua, 10 cabor diselenggarakan diluar Papua, namun kemudian ada kebijakan yang mengatakan bahwa semua even hanya diadakan di Papua. Pertandingan dimulai tanggal 23 September 2021.
3. Grand Design olahraga unggulan telah kami tetapkan termasuk masuknya olahraga balap sepeda sebagai olahraga unggulan.
4. Persoalan dualisme KNPI sudah mencoba diselesaikan dengan pendekatan persuasif, meskipun dualisme bahkan terjadi juga pada cabor-cabor.

**J. Pejabat Kemenparekraf RI menyampaikan Rincian Anggaran Dekonsentrasi 2021 provinsi Jawa Timur** sebesar Rp437.964.000 dari Deputi Kebijakan strategis, Rp4.774.610.600 dari Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan, Rp 37.142.030.000 dari Deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur, Rp 6.424.682.000 dari Deputi bidang industri dan investasi, Rp 200.000.000 dari bidang pemasaran dan Rp1.100.000

dari deputi bidang produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (event), serta Rp2.289.820.000 dari deputi bidang ekonomi digital dan produk kreatif. Program untuk Malang Raya: bedah desain kuliner dengan nilai beberapa ratus produk UMKM.

### III. KESIMPULAN

#### 1. Bidang Pendidikan Dasar Menengah

Evaluasi terhadap pelaksanaan PIP, BOS, Kurikulum 2013, PJJ dan vaksinasi oleh Dinas Pendidikan Kota Malang menyimpulkan antara lain bahwa: (1) PIP Sudah tepat sasaran, hanya kendala pada data dan pencairan yang sering tidak sinkron karena siswa penerima ada yang telah lulus ketika dana cair ; (2) Program BOS sudah sesuai dengan peruntukannya bahkan tahun 2021 dengan panduan yang lebih aspiratif kebutuhan operasional sekolah; (3) terkait Kurikulum 2013, Satuan pendidikan menyelenggarakan kurikulum sesuai dengan panduan dari pemerintah pusat dan implementasinya sesuai kondisi satuan pendidikan; (3) Terkait PJJ, Sekolah mengembangkan pola sesuai kondisi satuan pendidikan dan peserta didik. Implementasi dengan kombinasi daring sinkron dan asinkron ; (4) Terkait vaksinasi, hingga saat ini masih ada beberapa GTK di suatu sekolah yang belum vaksinasi dan bahkan ada sekolah yang semua GTK nya masih belum vaksinasi, menyesuaikan dengan keersediaan vaksin; (5) Terkait program merdeka belajar, Merdeka Belajar memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan.

#### 2. Bidang Pendidikan Tinggi

- a. Perguruan tinggi menghadapi beberapa permasalahan antara lain menyangkut akreditasi, jurnal terindeks scopus, Guru Besar dan ketersediaan sumber daya manusia.
- b. Tes swab antigen menjelang UTBK dirasakan mahal, sehingga UTBK di Universitas Brawijaya tidak mensyaratkan swab antigen bagi peserta, cukup tes suhu dan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan.
- c. Untuk mewujudkan insan Pendidikan Tinggi, maka diperlukan hilirisasi hasil penelitian. Artinya dosen yang memiliki penelitian, hendaknya bisa disinergikan dengan dunia industri.
- d. Terkait pembelajaran jarak jauh, terdapat kendala pada *provider* internet, meskipun telah ada bantuan kuota pendidikan dari Kemendikbud RI.

#### 3. Bidang Olahraga

- a. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Malang menyayangkan adanya 10 cabor yang ditunda dalam PON Papua dan Peparnas, dan menghimbau agar hal ini tidak menjadi hambatan bagi even yang ada di daerah.
- b. Persoalan dualisme di organisasi kepemudaan seperti KNPI perlu segera diselesaikan dengan pendekatan persuasif, dualisme kepemimpinan bahkan terjadi juga pada beberapa cabang olahraga.

#### 4. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Permasalahan yang dihadapi terkait pengembangan ekonomi kreatif dalam 3 tahun terakhir: (1). Lemahnya Pemasaran produk-produk kreatif; (2) Kurangnya kepercayaan konsumen atas kualitas produk kreatif; (3)

Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan; (4) Kurangnya pendampingan dari para pelaku profesional (5) Perlunya pemusatan pengembangan ekonomi kreatif; (6) Kurangnya dukungan untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

- b. Dukungan pemerintah terhadap pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2020 yang terdampak pandemi covid 19 antara lain (1) Bantuan insentif dan bansos dari Kemenpar RI kepada hotel dan restoran di kota Malang di tahun 2020 sebagai salah satu bentuk apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri dan semangat para pelaku usaha pariwisata untuk menata kembali usahanya (2) Pemerintah Kota Malang juga mengucurkan bantuan sosial yang diterima oleh pedagang WBT (Wisata Belanja Tugu) selama 3 (tiga) bulan diawal pandemi untuk membantu menggairahkan semangat berusaha .

#### **IV. REKOMENDASI**

Terkait dengan kondisi dan permasalahan yang muncul sebagaimana kesimpulan angka III tersebut, Komisi X DPR RI merekomendasikan, sebagai berikut:

##### **1. Bidang Pendidikan Dasar Menengah**

- a. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk segera mengatasi permasalahan kekurangan dan pemerataan guru SD dan SMP Negeri di Kota Malang, karena selama ini banyak diisi oleh tenaga Honoror.
- b. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk mengevaluasi kebijakan pemisahan kewenangan Pemda dan Pemprov pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggungjawan atas pendidikan setingkat SMA/SMK.
- c. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk bersinergi dengan K/L lain sehingga program vaksinasi untuk GTK sudah selesai sebelum dimulainya Pembelajaran Tatap Muka.

##### **2. Bidang Pariwisata**

- a. Dengan ditetapkan adanya tiga subsektor sebagai prioritas dan unggulan dari kota Malang berdasarkan Perwal Nomor 12 tahun 2018, yaitu game dan aplikasi merupakan subsektor prioritas, sedangkan film, video, animasi dan kuliner sebagai subsektor unggulan, maka Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk memberikan dukungan anggaran dan fasilitasi terhadap program tersebut.
- b. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya Kota Malang untuk mengembangkan kampung tematik dan membuat aturan yang detail mengenai pengaturan kampung tematik. Aturan secara detail tentang kampung/desa wisata ini akan menjadi pedoman yang terarah, terukur



dan terencana bagi daerah untuk menjalankan pengelolaan kampung/desa wisata sehingga bisa dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat sekitar dan menjadi contoh bagi daerah lain.

### **3. Bidang Olahraga**

- a. Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk memberikan dukungan anggaran tidak hanya untuk Wilayah Jawa Timur secara umum namun juga secara khusus untuk peningkatan prestasi olahraga di Kota Malang.
- b. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk memfasilitas event cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di PON Papua agar proses perekrutan dan latihan atlet terus berkesinambungan.

## **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR-RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Kota Malang Jawa Timur, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 21 April 2021

**Ketua Tim/  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

TTD.

**Dr. DEDE YUSUF ME, S.T, M.I.Pol**  
**A-539**